



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI

**UNIT KERJA** : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDA BAGUS SETIAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 718064

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 990.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 990.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 250.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ A/T / MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOTOR, SUZUKI UK125SC / SPD MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA X1B02N04L0A/T / SPD MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOBIL, FIAT 128/SEDAN Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOTOR, SPRINTER PRIME MOTOR LISTRIK/EXOTIC Tahun 2022, HADIAH Rp. 10.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 54.600.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 719.718.521

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.014.818.521

**III. HUTANG** Rp. 177.395.228

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.837.423.293



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.